

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BUNGANAN
DI SUMATERA BARAT**

DRAFT SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD LUTHFI
2015/ 1506000102

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
DI SUMATERA BARAT**

Nama : **Muhammad Luthfi**
TM/NIM : **2015/15060102**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Keahlian : **Ekonomi Publik**
Fakultas : **Ekonomi**

Padang, September 2022

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, SE, ME

NIP.19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Mike Triani, SE, MM

NIP.19840129 200912 2 202

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
di Sumatera Barat**

Nama : **Muhammad Luthfi**
TM/NIM : **2015 / 15060102**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Keahlian : **Ekonomi Publik**
Fakultas : **Ekonomi**

Padang, Juni 2021

| Nomor | Tim Penguji | Nama |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Ketua | Mike Triani, SE, MM |
| 2. | Anggota | Ariusni, SE, M.Si |
| 3. | Anggota | Novya Zulfa Riani, SE, M.Si |



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman (Mike Triani) and two members (Ariusni and Novya Zulfa Riani), each with a horizontal line below their signature.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

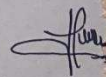
Nama : Muhammad Luthfi
NIM / Tahun Masuk : 15060102 / 2015
Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi / 24 Juni 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Pondok Pratama 1 blok G/19
No. HP / Telepon : 082215423128
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis / skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini, **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, September 2022
Yang menyatakan,



Muhammad Luthfi
NIM. 15060102



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SUMATERA BARAT

Muhammad Luthfi¹, Mike Triani²

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Mohluthfi2406@gmail.com , miketiani@gmail.com

Abstract : This study aims to prove and analyze (1) the effect of gross domestic product on the realization of PBB in West Sumatra. (2) the amount of land to the realization of PBB in West Sumatra (3) building area to the realization of PBB in West Sumatra. (4) inflation on the realization of PBB in West Sumatra. (5) together with GRDP, total land area, building area and inflation towards the realization of PBB in West Sumatra. This type of research is quantitative research. In this study, the data used is panel data from 2015 – 2019 in 19 districts and cities in West Sumatra. The method used is a panel regression model with the selected panel regression estimation model, namely the Random Effect Model (REM.) The results obtained show that: (1) GRDP is not significant to the realization of PBB in West Sumatra (2 land area has a significant effect on the realization of PBB in Sumatra). West Sumatra (3) building area has a significant effect on PBB realization in West Sumatra (4) inflation is not significant on PBB realization in West Sumatra Together with GRDP, land area, building area and inflation have a significant effect on PBB in West Sumatra. the results of the study that the increasing number of people who own land and inflation is still under control, it actually encourages the realization of the payment of Land and Building Taxes in West Sumatra, therefore by observing the factors that encourage changes in the realization of PBB payments can provide a solution in the form of policies for local government to improve the actual value of land and building tax payments in 19 districts and cities in West Sumatra.

Keywords: Land and building tax, gross domestic product, land area, building area, inflation

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SUMATERA BARAT

Muhammad Luthfi¹, Mike Triani²

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Mohluthfi2406@gmail.com , miketiani@gmail.com

Abstrak Penelitian ditujukan untuk membuktikan (1) pengaruh product domestic bruto terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (2) jumlah lahan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat (3) luas bangunan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (4) inflasi terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (5) secara bersama PDRB, jumlah lahan, luas bangunan dan inflasi terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dari tahun 2015 – 2019 pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah model regresi panel dengan model estimasi regresi panel terpilih yaitu *Random Effect Model (REM.)* Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa: (1) PDRB tidak signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat (2) luas lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (3) luas bangunan berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (4) inflasi tidak signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. Secara bersama-sama PDRB, luas lahan, luas bangunan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PBB di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian semakin banyaknya masyarakat yang memiliki luas lahan serta masih terkendalanya inflasi, justru mendorong masih belum tercapainya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat, oleh sebab itu dengan mengamati faktor yang mendorong perubahan realisasi pembayaran PBB tersebut dapat memberikan sebuah solusi dalam bentuk kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai realiasi pembayaran Pajak PBB 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kata Kunci : *Pajak bumi dan bangunan, product domestic bruto, luas lahan, luas bangunan, inflasi*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 10 |
| C. Pembatasan Masalah | 10 |
| D. Perumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS | 13 |
| 1. Pajak | 13 |
| a) Defenisi Pajak..... | 13 |
| b) Fungsi Pajak | 14 |
| c) Sistem Pemungtan Pajak | 15 |
| d) Jenis-Jenis Pajak di Indonesia | 16 |
| e) Penggolongan Jenis Pajak | 16 |
| 2. Pajak Bumi dan Bangunan..... | 17 |
| a) Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)..... | 17 |
| b) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 |
| c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 19 |
| 3. <i>Product Domestic Regional Bruto</i> | 20 |
| a) Definisi <i>Product Domestic Regional Bruto</i> | 20 |
| b) Pengaruh <i>Product Domestic Regional Bruto</i> Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23 |
| 4. Luas Lahan..... | 24 |
| a) Definisi Lahan..... | 24 |
| b) Penggunaan Lahan | 25 |
| c) Pengaruh Luas Lahan Terhadap Realisasi Pendapatan | |

| | |
|--|----|
| Asli Daerah (PBB) | 26 |
| 5. Luas Bangunan..... | 27 |
| a) Definisi Luas Bangunan | 27 |
| b) Pengaruh Luas Bangunan Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 29 |
| 6. Inflasi..... | 30 |
| a) Definisi Inflasi | 30 |
| b) Penggolongan Inflasi dan Penyebab Terjadinya Inflasi..... | 31 |
| c) Pengaruh Inflasi Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 33 |
| 7. Hipotesis | 34 |
| 8. Model Kerangka Konseptual | 34 |

BAB III METODE PENELITIAN36

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Objek Penelitian..... | 36 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| D. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 37 |
| 1. Variabel Dependen | 37 |
| 2. Variabel Independen..... | 37 |
| E. Metode Analisis Data | 39 |
| F. Pengujian Asumsi Klasik..... | 43 |
| G. Uji Kesesuaian Model | 45 |
| H. Pengujian Hipotesis..... | 46 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....50

| | |
|---|----|
| A. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian | 50 |
| 1. Deskriptif Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 50 |
| 2. Deskriptif Statistik Perkembangan PDRB di Sumatera Barat | 52 |
| 3. Deskriptif Statistik Variabel Luas Lahan..... | 53 |
| 4. Deskriptif Statistik Variabel Luas Bangunan..... | 55 |
| 5. Deskriptif Statistik Variabel Inflasi..... | 57 |
| B. Analisis Regresi Data Panel..... | 58 |
| 1. Hasil Pengujian Normalitas | 58 |
| 2. Model Regresi Panel..... | 60 |
| 3. Pengujian Persyaratan Regresi Panel | 63 |
| C. Pengujian Hipotesis..... | 65 |

| | |
|--|-----------|
| D. Pembahasan | 68 |
| 1. Pengaruh Product Domestic Regional Bruto Terhadap Realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)..... | 68 |
| 2. Pengaruh Luas Lahan Terhadap Realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 71 |
| 3. Pengaruh Luas Bangunan Terhadap Realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 73 |
| 4. Pengaruh Inflasi Terhadap Realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)..... | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran | 78 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di wilayah pantai Barat Sumatera. Sebagian besar geografis Sumatera Barat didominasi oleh laut dan sebagian lagi didominasi oleh wilayah perbukitan. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tidak memiliki banyak potensi sumber daya alam galian, akan tetapi Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata. Menurut Munaf (2020) pemerintah Sumatera Barat menyadari kelemahan yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, salah satunya adalah dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing kepala keluarga yang memiliki lahan yang ditempati atau lahan produktif yang dikelola.

Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi salah satu instrument yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), untuk melakukan pengumpulan PBB pemerintah daerah menugaskan masing-masing kepala desa atau kepala jorong hingga pemerintah legislative di masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Permasalahan yang terus terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat pada umumnya berkaitan dengan pembayaran PBB adalah tidak tercapainya realisasi target pembayaran PBB pada sejumlah 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat akibatnya target pendapatan asli daerah yang dicanangkan pemerintah juga tidak terwujud.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dapat diamati realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada 19 kabupaten dan Kota di Sumatera Barat seperti terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Periode 2015 – 2019 (Dalam %)

| No | Kabupaten / Kota | Realisasi Pembayaran PBB | | | | |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 58.67 | 57.12 | 57.42 | 59.60 | 55.78 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 71.53 | 73.64 | 74.54 | 72.43 | 69.89 |
| 3 | Kabupaten Solok | 62.53 | 65.81 | 66.54 | 62.54 | 67.32 |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 55.91 | 58.82 | 56.43 | 57.32 | 59.32 |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 63.56 | 61.82 | 63.43 | 67.43 | 69.32 |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 67.43 | 66.21 | 65.43 | 71.43 | 69.54 |
| 7 | Kabupaten Agam | 59.43 | 57.90 | 58.11 | 59.43 | 62.89 |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 49.89 | 51.77 | 52.50 | 54.87 | 57.43 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 65.54 | 66.89 | 67.43 | 69.89 | 71.54 |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan | 53.54 | 56.92 | 55.17 | 49.54 | 53.84 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 56.43 | 56.22 | 57.93 | 59.43 | 61.43 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 66.89 | 67.32 | 68.88 | 72.32 | 74.33 |
| 13 | Kota Padang | 57.12 | 55.89 | 59.43 | 62.98 | 64.72 |
| 14 | Kota Solok | 51.54 | 49.43 | 55.83 | 53.54 | 58.90 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 57.90 | 61.60 | 58.90 | 63.43 | 61.39 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 67.90 | 70.97 | 68.88 | 72.34 | 75.43 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 55.90 | 52.01 | 52.59 | 59.10 | 61.54 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 54.53 | 58.91 | 62.83 | 68.92 | 69.71 |
| 19 | Kota Pariaman | 59.99 | 62.43 | 60.78 | 63.43 | 67.21 |
| Rata Rata | | 59.80 | 60.61 | 61.23 | 63.15 | 64.82 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2020)

Sesuai dengan Tabel 1.1 terlihat bahwa tidak ada satu pun daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang mampu memenuhi realisasi PBB hingga 100%, dari data terlihat bahwa masih terjadi sejumlah permasalahan di sejumlah daerah sehingga realisasi PBB masih belum mencapai target. Jika dirata-ratakan total persentase realisasi PBB tahun 2015 sampai dengan 2019 memang relatif mengalami peningkatan, akan tetapi tidak seluruh kabupaten dan kota yang mampu mencapai peningkatan

target, dalam hal ini masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang masih jauh dari target yang dibebankan pemerintah daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak akan maksimal, oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba melakukan penelitian membahas sejumlah faktor yang mempengaruhi realisasi pembayaran PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan permukaan bumi, tubuh bumi serta kekayaan yang tersimpan di dalamnya yang meliputi tanah, bangunan pekarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman serta laut yang terletak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemerintah daerah PBB akan membantu pendapatan asli daerah oleh sebab itu realisasi pembayarannya harus mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu Febrianti, (2017) terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diantaranya adalah *product domestic regional bruto*, luas lahan, dan jumlah kepala keluarga. Masing masing variabel diduga mempengaruhi peningkatan atau penurunan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan patokan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. PDRB menunjukkan sejauhmana tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu wilayah atau daerah. Selain itu PDRB menunjukkan total atau agregat kegiatan pembelanjaan barang dan jasa di seluruh pasar dalam perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto dapat diketahui dengan cara menjumlahkan nilai output bersih perekonomian yang

ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung dalam satu tahun. Sesuai dengan uraian teori tersebut peneliti menduga bahwa semakin tinggi PDRB sebuah daerah akan meningkatkan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat diketahui bahwa nilai PDRB Berdasarkan harga berlaku menurut satuan jutaan Rupiah yang dimiliki oleh sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat relatif bervariasi seperti terlihat didalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Satuan (Jutaan Rupiah)
Pada 19 Kabupaten dan Kota Tahun 2010 Periode 2015 – 2019

| No | Kabupaten / Kota | PDRB | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 3.395.690 | 3.725.729 | 4.001.871 | 4.253.493 | 4.643.666 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 10.207.177 | 11.271.402 | 12.069.519 | 13.049.684 | 14.044.809 |
| 3 | Kabupaten Solok | 10.155.134 | 11.053.490 | 11.783.868 | 12.657.029 | 13.586.894 |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 6.920.727 | 7.439.227 | 7.927.672 | 8.491.256 | 9.133.599 |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 9.901.482 | 10.734.515 | 11.428.082 | 12.205.444 | 13.095.475 |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 15.845.888 | 17.532.873 | 19.038.380 | 20.441.907 | 21.287.272 |
| 7 | Kabupaten Agam | 15.247.792 | 16.693.045 | 17.834.986 | 19.150.622 | 20.549.474 |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 11.582.972 | 12.677.544 | 13.531.195 | 14.522.497 | 15.615.533 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 6.505.370 | 7.335.785 | 7.801.982 | 8.320.785 | 8.908.515 |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan | 4.236.187 | 4.598.219 | 4.893.871 | 5.216.180 | 5.575.240 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 7.725.470 | 8.437.661 | 9.054.277 | 9.700.228 | 10.351.223 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 11.712.937 | 12.794.250 | 13.699.696 | 14.607.235 | 15.400.992 |
| 13 | Kota Padang | 45.092.947 | 49.386.264 | 53.091.095 | 57.519.790 | 62.457.554 |
| 14 | Kota Solok | 2.964.890 | 3.241.246 | 3.469.036 | 3.729.203 | 4.050.430 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 2.715.005 | 2.937.954 | 3.165.215 | 3.405.158 | 3.681.649 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 2.533.045 | 2.774.050 | 2.974.351 | 3.198.672 | 3.476.556 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 6.169.751 | 6.783.086 | 7.453.107 | 8.012.717 | 8.699.579 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 4.676.062 | 5.203.120 | 5.639.684 | 6.136.246 | 6.828.559 |
| 19 | Kota Pariaman | 3.699.444 | 4.036.742 | 4.309.010 | 4.616.858 | 5.008.383 |
| Rata Rata Skor | | 9.541.472 | 10.455.590 | 11.219.310 | 12.065.000 | 12.968.179 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2020)

Pada Tabel 2 terlihat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan nilai produk domestic regional bruto yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat. Jika diamati rata rata nilai product domestic regional bruto terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai Rp 12.968,179 sedangkan rata rata nilai product domestic regional bruto terendah terjadi pada tahun 2015 yang lalu yaitu sebesar Rp 9.514.472. Walaupun demikian terjadinya peningkatan PDRB secara agregat provinsi Sumatera Barat tidak di iringi oleh pemerataan peningkatan PDRB pada 19 kabupaten dan kota, dimana masih terdapat sejumlah kabupaten yang justru memiliki angka PDRB yang digolongkan rendah, kondisi tersebut mempengaruhi pemerataan pendapatan yang terjadi di masyarakat serta ikut mempengaruhi kemampuan masyarakat yang menjadi wajib pajak memenuhi kewajiban mereka sehingga meningkatkan realisasi nilai pembayaran PBB yang ditargetkan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Susetyo, dan Yunisvita, (2016) menemukan bahwa terjadinya peningkatan pertumbuhan produk domestic regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yang mendukung lainnya juga diperoleh oleh Yulianis, et al., (2017) yang menemukan bahwa peningkatan PDRB akan mendorong meningkatnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat, selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa meningkatnya pertumbuhan produk domestic regional bruto sebuah daerah akan mendorong meningkatnya realiasi pembayaran PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Sa'diah, et al., (2019) besarnya nilai pembayaran PBB akan sangat bergantung pada lahan yang dimiliki masyarakat. Semakin besar luas lahan yang dimiliki masyarakat akan besar pula nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Oleh sebab itu peneliti menduga dengan semakin luasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat maka akan meningkatkan realisasi pembayaran PBB dengan asumsi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut terus meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati, (2020) menemukan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap realisasi PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, hasil yang berbeda diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian terlihat terjadinya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu.

Selain *product domestic regional bruto*, luas lahan dan jumlah kepala keluarga, terjadinya peningkatan realisasi pembayaran PBB juga dipengaruhi oleh jumlah kepala keluarga yang menjadi wajib pajak. Semakin banyak jumlah kepala keluarga maka akan semakin besar jumlah tagihan pajak, ketika seluruh anggota masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan semakin tinggi, dengan demikian peneliti

menduga bahwa jumlah kepala keluarga yang menjadi wajib pajak berpengaruh positif terhadap realiasi pembayaran PBB pada sebuah daerah khususnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat diketahui terjadi peningkatan jumlah kepala keluarga di Sumatera Barat seperti terlihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah Persentase Keluarga Menurut Luas Bangunan Rumah > 150 M²
Tahun 2015 – 2019 di Sumatera Barat

| No | Kabupaten / Kota | Luas Bangunan > 150 M ² | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1,88 | 7,28 | 0,75 | 3,60 | 2,75 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 5,59 | 3,92 | 5,30 | 4,57 | 6,21 |
| 3 | Kabupaten Solok | 4,59 | 7,25 | 6,13 | 6,78 | 3,36 |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 4,37 | 6,82 | 5,99 | 5,88 | 3,67 |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 3,81 | 7,15 | 6,02 | 5,03 | 5,78 |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 5,79 | 8,15 | 11,92 | 8,82 | 7,86 |
| 7 | Kabupaten Agam | 4,77 | 6,16 | 4,20 | 6,02 | 9,38 |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3,60 | 4,07 | 5,75 | 4,06 | 7,95 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 2,80 | 4,17 | 2,67 | 4,75 | 3,11 |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan | 2,49 | 5,10 | 6,96 | 3,75 | 5,29 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 7,53 | 8,95 | 8,10 | 8,79 | 10,49 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 4,54 | 4,36 | 5,12 | 7,09 | 6,13 |
| 13 | Kota Padang | 11,65 | 15,41 | 16,36 | 15,19 | 12,44 |
| 14 | Kota Solok | 4,99 | 9,76 | 6,36 | 10,13 | 8,72 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 6,89 | 6,39 | 6,13 | 5,59 | 5,38 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 9,38 | 11,69 | 8,74 | 10,08 | 9,50 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 7,49 | 7,45 | 11,27 | 11,65 | 6,92 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 12,32 | 11,07 | 9,26 | 9,66 | 8,28 |
| 19 | Kota Pariaman | 11,67 | 16,73 | 12,52 | 15,51 | 12,79 |
| Rata Rata | | 6,11 | 7,99 | 7,34 | 7,73 | 7,15 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2020)

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 1.3 terlihat rata rata keluarga yang memiliki luas bangunan rumah diatas 150 m² pada data tahun 2015 di sumatera meningkat sebesar 6,11%. Nilai tersebut terus meningkat pada kisaran 7% per tahun terlihat dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Nilai rata rata tertinggi terjadi pada tahun

2016 dengan nilai rata rata mencapai 7.99%. Dengan terus meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki luas lahan diatas 150 m² sejalan dengan meningkatnya wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat, ketika masyarakat tersebut emnyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak tentu realisasi pembayaran pajak yang ditargetkan pemerintah khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa luas bangunan tempat tinggal masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bungunan, hasil penelitian yang sejalan diperoleh oleh Febrianti (2017) yang menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki luas bangunan rumah yang luas akan semakin meningkatka realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya hasil penelitian Wawan (2018) yang menemukan bahwa luas banguna rumah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sigi. Hal tersebut disebabkan semakin luas bangunan perumahan yang dimiliki masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik sehingga mendorong meningkat realiasi pembayaran Pajak dan Bangunan.

Adnan, (2011) mengungkapkan disamping luas lahan, hingga luas bangunan besarnya pencapaian realisasi PBB juga dapat dipengaruhi oleh angka inflasi yang terjadi disebuah daerah. Inflasi muncul ketika mata uang lokal terlalu banyak beredar dimasyarakat akibatnya nilai guna mata uang tersebut mengalami penurunan. Ketika inflasi mengalami peningkatan menunjukkan terjadinya peningkatan harga berbagai kebutuhan pokok, akibatnya pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan

akan relatif tinggi, keterbatasan anggaran yang dimiliki masyarakat mendorong ketidaksanggupan dari anggota masyarakat memenuhi kewajiban pajak khususnya PBB. Dengan demikian peneliti menduga bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

Hasil penelitian Agustina et al., (2016) menemukan inflasi berpengaruh positif terhadap realisasi PBB di sejumlah daerah khususnya provinsi di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Brabowo, (2019) menemukan semakin tinggi inflasi yang terjadi pada sebuah daerah maka akan semakin menurunkan realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah. Selanjutnya hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Adnan, (2011) yang menemukan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

Berdasarkan uraian fenomena dan adanya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk mencoba kembali melakukan penelitian yang membahas pengaruh sejumlah variabel terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian empiris yang berjudul: **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sumatera Barat.**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka diajukan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Tidak tercapainya target realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
2. Terus meningkatnya pertumbuhan PDRB pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tidak mendorong terjadinya perbaikan dalam realiasi Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Semakin banyaknya masyarakat di Sumatera memiliki lahan dan bangunan untuk dikelola dan dijadikan sebagai tempat tinggi yang luas, sehingga meningkatkan beban PBB yang menjadi kewajiban masyarakat tersebut.
4. Terus bertambahnya jumlah masyarakat yang memiliki rumah dengan luas bangunan yang berbeda beda sehingga mempengaruhi besarnya Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang menjadi kewajiban
5. Tidak stabilnya tingkat inflasi pada berbagai kabupaten / kota di Sumatera Barat mendorong meningkatnya pengeluaran masyarakat dan memperlemah tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayarkan PBB.

C. Pembatasan Masalah

Agar hasil penelitian yang diperoleh saat ini tidak mengambang maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu:

1. Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi realiasi PBB di Sumatera Barat hanya dibatasi dengan menggunakan variabel *product domestic regional bruto*, jumlah lahan, luas bangunan dan tingkat inflasi
2. Pada penelitian ini digunakan data 19 kabupaten dan kota dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

D. Perumusan Masalah

Sejalan dengan identifikasi masalah maka diajukan beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh *product domestic regional bruto* (PDRB) terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah pengaruh luas lahan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah pengaruh luas bangunan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat ?
4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah yang diajukan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh *product domestic regional bruto* terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat.

2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh jumlah lahan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat.
3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh luas bangunan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat.
4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat

F. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Pemerintah daerah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan daerah yang berkaitan dengan realiasi pengumpulan Pajak Bumi Bangunan oleh aparaturn pemerintah yang ditugaskan.
2. Praktisi hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan seluruh pihak terkait yang membaca penelitian ini khususnya mengenai sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat
3. Akademisi, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang.